****

**STARTEGI DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM MENINGKATKAN CAKUPAN KEPEMILIKAN KTP-EL**

**M. Akbar**1

1Institusi Teknologi Bisnis dan Administrasi Al Gazali Barru, Indonesia.

Email: 1akbarbabba23@gmail.com

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik KTP-el di Provinsi Sulawesi Selatan. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinisi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan cakupan kepemilikan KTP-el yakni : 1) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan Kabupaten/Kota dalam penyediaan Blangko KTP-el; 2) Meningkatkan kapasitas penyelenggara administrasi kependudukan dalam penerbitan KTP-el melalui pelatihan atau bimbingan teknis.

**Kata kunci:** Strategi, Peningkatan, KTP-EL

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke 4 setelah Amerika Serikat. Selain jumlah penduduknya yang besar, Indonesia juga merupakan negara kepulauan, sehingga dengan demikian tidak meratanya persebaran penduduk membuat Indonesia mengalami permasalahan terkait dengan hal kependudukan. Disamping itu, terdapat faktor geografi, tingkat migrasi, struktur kependudukan yang dimiliki oleh Indonesia membuat masalah kependudukan menjadi semakin kompleks, serta perlu mendapatkan perhatian khusus dalam rangka pembangunan manusia Indonesia dimasa yang akan datang, Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, termasuk dalam hal pembuatan dan distribusi KTP-EL (Rosyanty, 2018).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan KTP-EL. Penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang kurang efektif dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat KTP-EL berkontribusi pada rendahnya angka perekaman (Wahyuni, Akib, & Darwis, 2017). Oleh karena itu, strategi komunikasi dan sosialisasi yang lebih baik diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program ini. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik di Disdukcapil dapat berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat dan tingkat kepemilikan KTP-EL (Apriliani, Nur, & Mulyadi, 2019), penelitian lainnya juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam proses pembuatan KTP-el (Sukma, Amrina, & Hasan, 2018). Dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini, Disdukcapil dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan KTP-el, yang pada gilirannya akan meningkatkan cakupan kepemilikan KTP-el di Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil olahan Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang diperoleh dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengemukakan jumlah penduduk Indonesia pada 2018 mencapai 265 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 133,17 juta jiwa laki-laki dan 131,88 juta jiwa perempuan.Menurut kelompok umur, penduduk yang masih tergolong anak-anak (0-14 tahun) mencapai 70,49 juta jiwa atau sekitar 26,6% dari total populasi. Untuk populasi yang masuk kategori usia produktif (14-64 tahun) 179,13 juta jiwa (67,6%) dan penduduk usia lanjut 65 ke atas sebanyak 85,89 juta jiwa (5,8%).Dari proyeksi tersebut, jumlah kelahiran pada tahun ini mencapai 4,81 juta jiwa sedangkan jumlah kematian 1,72 juta jiwa. Adapun rasio angka ketergantungan (usia produktif terhadap usia nonproduktif) sebesar 47,9%, lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 48,1% dan juga turun dari posisi 2010 yang mencapai 50,5%.

Permasalahan kependudukan telah menjadi masalah penting bagi pemerintah dan para pakar kependudukan di Indonesia (Risni, Yuhan, & Ruri Indraswari, 2017). Saat ini permasalahan kependudukan yang muncul di setiap daerah mengarah pada permasalahan administrasi kependudukan. Permasalahan kependudukan yang timbul saat ini masih terus menghadapi kendala dan tantangan yang cukup berat. Permasalahan tersebut juga dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Setalan. Berdasarkan kondisi penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut data yang diperoleh pada Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berancana Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah penduduk saat ini sebesar 9.490.123 juta jiwa yang tersebar pada setiap daerah dari 24 kabupaten/kota. Perkembangan jumlah penduduk diproyeksi akan terus mengalami penambahan setiap tahunnya. Berikut rincian jumlah dan presentase data penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.

**Tabel 1. Data Jumlah Penduduk Tahun 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | KAB/KOTA | JENIS KELAMIN | PENDUDUK |
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
| n(Jiwa) | (%) | n(Jiwa) | (%) | n(Jiwa) | (%) |
| 7301 | KEPULAUAN SELAYAR | 67,625 | 0,71 | 70,273 | 0,74 | 137.538 | 1,45 |
| 7302 | BULUKUMBA | 214,884 | 2,26 | 221.004 | 2,33 | 435.888 | 4,59 |
| 7303 | BANTAENG | 98.754 | 1,04 | 100.615 | 1,06 | 199.369 | 2,1 |
| 7304 | JENEPONTO | 204,013 | 2,15 | 207,623 | 2,19 | 411.636 | 4,34 |
| 7305 | TAKALAR | 140.846 | 1,48 | 148.525 | 1,57 | 289.371 | 3,05 |
| 7306 | GOWA | 374.494 | 3,95 | 379.928 | 4 | 754.422 | 7,95 |
| 7307 | SINJAI | 126.692 | 1,33 | 129.324 | 1,36 | 256.016 | 2,7 |
| 7308 | BONE | 425.126 | 4,48 | 443.890 | 4,68 | 869.016 | 9.16 |
| 7309 | MAROS | 192.939 | 2.03 | 189.919 | 2 | 382.858 | 4,01 |
| 7310 | PANGKEP | 177.700 | 1,87 | 183.618 | 1,93 | 361.318 | 3,81 |
| 7311 | BARRU | 86.547 | 0,91 | 90.746 | 0,96 | 177.293 | 1,87 |
| 7312 | SOPPENG | 112.906 | 1.19 | 121.942 | 1,28 | 234.848 | 2,47 |
| 7313 | WAJO | 216.644 | 2,28 | 227.662 | 2,4 | 444.306 | 4,68 |
| 7314 | SIDENRENG RAPPANG | 156.765 | 1,65 | 159.188 | 1,68 | 315.953 | 3,33 |
| 7315 | PINRANG | 197.528 | 2,08 | 203.325 | 2,14 | 400.853 | 4,22 |
| 7316 | ENREKANG | 123.655 | 1,3 | 119.010 | 1,25 | 242.665 | 2,56 |
| 7317 | LUWU | 190.599 | 2.01 | 187.605 | 1,98 | 378.204 | 3,99 |
| 7318 | TANA TORAJA | 147.850 | 1,56 | 137.192 | 1,45 | 285.042 | 3 |
| 7322 | LUWU UTARA | 186.697 | 1,97 | 181,524 | 1,91 | 368.221 | 3,88 |
| 7324 | LUWU TIMUR | 154.147 | 1,62 | 144.834 | 1,53 | 298.981 | 3,14 |
| 7326 | TORAJA UTARA | 124.538 | 1,31 | 119.674 | 1,26 | 244.212 | 2,57 |
| 7371 | MAKASSAR | 838.135 | 8,83 | 832.866 | 8,78 | 1.671.001 | 17.61 |
| 7372 | PARE-PARE | 71.677 | 0.76 | 73.283 | 0,77 | 144.960 | 1.53 |
| 7373 | PALOPO | 93.091 | 0,98 | 93,061 | 0,98 | 186.152 | 1,96 |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 4.723.492 | 49,75 | 4.766.631 | 50,23 | 9.490.123 | 100 |

Sumber : Data Kependudukan Provinsi Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan

Berdasarkan table 1. dapat dipetakan bahwa daerah kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan untuk jumlah penduduknya paling banyak adalah Kota Makassar sebesar 1.671.001 juta jiwa atau 17,61% dari total penduduk Sulsel, disusul oleh Kabupaten Bone yang berjumlah 869.016 jiwa atau 9,16% dan selanjutnya Kabupaten Gowa yang berjumlah 754.422 jiwa atau 7,95%. Sedangkan untuk kabupaten/kota yang penduduknya paling sedikit adalah Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 137.538 jiwa atau 1,45%, disusul oleh Kota Pare-Pare yang berjumlah 144.960 atau 1,53%, serta Kabupaten Barru yang berjumlah 177.293 jiwa atau 1,87%. Kabupaten dan kota lainnya memiliki jumlah penduduk pada kisaran antara 186.153 sampai 444.306 jiwa atau proporsi antara 1,96% sampai dengan 4,68% dari total jumlah penduduk Sulawesi selatan.

Permasalahan administrasi kependudukan yang terkait dengan pendaftaran penduduk juga dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Setalan. Dimana pendaftaran penduduk adalah sarana untuk membangun basis data dan menerbitkan identitas bagi setiap penduduk dewasa dengan mencatumkan Nomor Penduduk sebagai identitas tunggal. Dari kegiatan pendaftaran penduduk ini kemudian diterbitkan 3 dokumen, yaitu : Biodata penduduk, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk. Permasalahan pendaftaran penduduk yang masih dihadapi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yakni terkait dengan masih kurangnya cakupan kepemilikan KTP-el. KTP-el merupakan Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi Cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dan penyelenggara.

Adapun kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan penerbitan KTP-el sebagai dokumen kependudukan dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pelaksanaan KTP-el merupakan salah satu program pemerintah yang diharapkan mampu mempercepat dan mendukung terbangunnya *database* kependudukan di kabupaten/kota, dan provinsi SeIndonesia. Sehingga, dengan demikian hal itu menjadi dasar bagi seluruh daerah untuk menyelenggarakan kebijakan yang terkait dengan penerbitan KTP-el. Melalui penerapan KTP-el maka setiap penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari dari penduduk. Dalam hal ini, untuk pelaksanaan KTP-el salah satunya diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, nomor: 471.13/8039/Dukcapil, tanggal 03 Mei 2018, tentang percepatan penerbitan KTP-el, sehingga menuntut Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan harus mempercepat penerbitan KTP-el agar dapat mencapai target nasional yakni 100%, namun sampai akhir 2018 data kepemilikan KTP-el di provinsi Sulawesi Selatan masih mencapai 87.61%. Adapun data dokumen kependudukan berdasarkan *database* Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) Provinsi Sulawesi Selatan, penerbitan KTP-el dengan jumlah Wajib KTP 6.680.487 juta jiwa, diperoleh data bahwa penduduk yang telah memiliki KTP-el sejumlah 5.852.672 juta jiwa dan yang belum memiliki KTP-el masih tersisa sebesar 827.815 jiwa.

Sehubungan dengan indikasi permasalahan yang ada, maka Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan selaku otoritas yang berwenang harus mengambil langkah strategis untuk mengatasi masalah administrasi kependudukan yang terkait dengan pendaftaran penduduk yang sedemikian kompleks, strategi dapat memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan dan memilih tujuan kebijakan publik yang tepat, dapat pula memahami tantangan yang ada, serta menetapkan tindakan yang harus dilakukan. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk menganalis strategi apa yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Provinsi Sulawesi Selatan.

**METODE**

**Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan tempat penelitian yakni Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan.

**Tipe Penelitian**

Tipe Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan.

**Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini data diperoleh dari informan diantaranya Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk dan Pencatan Sipil.

Pengumpulan data primer dengan cara langsung yakni peneliti melakukan wawancara dan melakukan observasi pada Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan dan pengumpulan data sekunder menggunakan data yang relevan yang berasal dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip resmi, dan penelitian sebelumnya yang terkait pendaftaran penduduk.

**Teknik Analisis Data**

Analisis Data pada penelitian ini mengacu pada teknik analisis data kualitatif, aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian, sehingga data diperoleh sampai tuntas

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan ketertiban dalam penerbitan dokumen dan Data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya dijelaskan Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen Kependudukan, Tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Administrasi Kependudukan di arahkan untuk :

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan public yang professional.
2. Meningkatnya kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan.
3. Memenuhi data statistic secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting.
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
5. Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hokum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialami Penduduk.
2. Memberikan Perlindungan status hak sipil Penduduk.
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.
4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sector terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

1. Dokumen Kependudukan.
2. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil.
3. Perlindungan Atas Data Pribadi.
4. Kepastian Hukum atas Kepemilikan Dokumen.
5. Informasi mengenai Data hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil atas dirinya atau keluarganya. Dan
6. Ganti rugi serta pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil serta pendayahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Permasalahan yang masih dihapadi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait pendaftaran penduduk yakni masih kurangnya cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk – Elektronik (KTP-el), dimana KTP-el merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 26 tahun 2013, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang berumur dibawah 17 tahun tetapi sudah pernah kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP-el.

KTP-el merupakan dokumen kependudukan pribadi seseorang sebagai warga negara Indonesia. Dengan dokumen kependudukan yang bisa dipertanggung jawabkan warga negara bisa mengurus surat-surat penting lainnya, kapan saja dan dimana saja. Sehingga Pemerintah perlu memberikan pelayanan terhadap masyarakat menyangkut dokumen kependudukan tersebut. KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/ pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi pada *database* kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum nomor induk kepandudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.

KTP Elektronik yang berbasis NIK Nasional, memuat kode keamanan dan rekam elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri seseorang. Rekam elektronik ini berisi biodata, pas photo, tanda tangan dan sidik jari tangan penduduk bersangkutan. Program penerapan KTP Elektronik yang berbasis NIK Nasional tersebut, dimaksudkan untuk digunakan sebagai identitas jati diri seseorang yang bersifat tunggal senantiasa dapat dikembangkan multi fungsi, dengan demikian mempermudah penduduk untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah maupun swasta karena tidak lagi memerlukan KTP setempat.

Dengan memiliki KTP-el penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya, misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Tabel dibawah ini menyajikan jumlah dan proporsi penduduk menurut kepemilikan KTP-el.

**Tabel.10**

**Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Menurut Kepemilikan dan Wajib KTP Elektronik.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KABUPATEN/ KOTA** | **KEPEMILIKN KTP ELEKTRONIK** | **WAJIB KTP ELEKTRONIK** | **PERSEN** |
| **ADA KTP-EL** | **BELUM KTP-EL** |
| **LAKI-LAKI** | **PEREMPUAN** | **LAKI-LAKI** | **PEREMPUAN** | **LAKI-LAKI** | **PEREMPUAN** | **JUMLAH** |
| **n(KTP)** | **n(KTP)** | **n(KTP)** | **n(KTP)** | **n(KTP)** | **n(KTP)** | **n(KTP)** | **(%)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7301 | KEPULAUAN SELAYAR | 41.539 | 46.792 | 5.146 | 4.214 | ***46.685*** | ***51.006*** | **97.691** | **1,46%** |
| 7302 | BULUKUMBA | 139.657 | 155.528 | 13.395 | 9.755 | ***153.052*** | ***165.283*** | **318.335** | **4,77%** |
| 7303 | BANTAENG | 63.310 | 67.359 | 8.737 | 4.302 | ***72.047*** | ***71.661*** | **143.708** | **2,15%** |
| 7304 | JENEPONTO | 110.296 | 122.843 | 33.586 | 28.627 | ***143.882*** | ***151.470*** | **295.352** | **4,42%** |
| 7305 | TAKALAR | 95.304 | 105.990 | 1.186 | 1.014 | ***96.490*** | ***107.004*** | **203.494** | **3,05%** |
| 7306 | GOWA | 231.916 | 248.408 | 25.126 | 27.583 | ***257.042*** | ***275.991*** | **533.033** | **7,98%** |
| 7307 | SINJAI | 86.752 | 92.298 | 438 | 331 | ***87.190*** | ***92.629*** | **179.819** | **2,69%** |
| 7308 | BONE | 252.690 | 281.957 | 52.937 | 49.110 | ***305.627*** | ***331.067*** | **636.694** | **9,53%** |
| 7309 | MAROS | 111.035 | 115.598 | 21.134 | 18.824 | ***132.169*** | ***134.422*** | **266.591** | **3,99%** |
| 7310 | PANGKAJENE KEPULAUAN | 105.188 | 116.268 | 17.676 | 15.527 | ***122.864*** | ***131.795*** | **254.659** | **3,81%** |
| 7311 | BARRU | 61.593 | 67.374 | 109 | 101 | ***61.702*** | ***67.475*** | **129.177** | **1,93%** |
| 7312 | SOPPENG | 82.209 | 93.789 | 1.386 | 871 | ***83.595*** | ***94.660*** | **178.255** | **2,67%** |
| 7313 | WAJO | 127.693 | 140.462 | 2.081 | 1.486 | ***129.774*** | ***141.948*** | **271.722** | **4,07%** |
| 7314 | SIDENRENG RAPANG | 102.066 | 110.536 | 6.483 | 4.721 | ***108.549*** | ***115.257*** | **223.806** | **3,35%** |
| 7315 | PINRANG | 129.830 | 141.128 | 4.594 | 3.295 | ***134.424*** | ***144.423*** | **278.847** | **4,17%** |
| 7316 | ENREKANG | 69.562 | 69.683 | 11.569 | 9.762 | ***81.131*** | ***79.445*** | **160.576** | **2,40%** |
| 7317 | LUWU | 112.405 | 117.569 | 17.913 | 13.992 | ***130.318*** | ***131.561*** | **261.879** | **3,92%** |
| 7318 | TANA TORAJA | 77.481 | 76.173 | 25.758 | 21.756 | ***103.239*** | ***97.929*** | **201.168** | **3,01%** |
| 7322 | LUWU UTARA | 99.718 | 101.907 | 33.396 | 30.105 | ***133.114*** | ***132.012*** | **265.126** | **3,97%** |
| 7324 | LUWU TIMUR | 98.078 | 93.801 | 4.720 | 3.935 | ***102.798*** | ***97.736*** | **200.534** | **3,00%** |
| 7326 | TORAJA UTARA | 73.438 | 74.589 | 4.833 | 3.810 | ***78.271*** | ***78.399*** | **156.670** | **2,35%** |
| 7371 | MAKASAR | 455.200 | 479.537 | 139.207 | 118.535 | ***594.407*** | ***598.072*** | **1.192.479** | **17,85%** |
| 7372 | PARE-PARE | 48.158 | 51.206 | 498 | 447 | ***48.656*** | ***51.653*** | **100.309** | **1,50%** |
| 7373 | PALOPO | 52.080 | 54.679 | 12.300 | 11.504 | ***64.380*** | ***66.183*** | **130.563** | **1,95%** |
| **73** | **SULAWESI SELATAN** | **2.827.198** | **3.025.474** | **444.208** | **383.607** | **3.271.406** | **3.409.081** | **6.680.487** | **100%** |

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memiliki KTP-el sebanyak 5.852.672 juta jiwa, sedangkan jumlah penduduk penduduk yang belum memiliki KTP-el yakni sebanyak 827.815 jiwa dari jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el sebanyak 6.680.487 juta jiwa. Dapat pula disimpulkan bahwa cakupan kepemilikan KTP-el di Provinsi Sulawesi Selatan masih belum mencapai target nasional, maka perlu adanya strategi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga dapat meningkatkan cakupan kepemilikan KTP-el. Dimana manajemen strategis adalah [seni](https://id.wikipedia.org/wiki/Seni) dan [ilmu](https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu) penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan - keputusan, manajemen strategis berfokus pada proses penetapan tujuan [organisasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi%22%20%5Co%20%22Organisasi), pengembangan [kebijakan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan%22%20%5Co%20%22Kebijakan) dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan [sumber daya](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya%22%20%5Co%20%22Sumber%20daya) untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Berbicara mengenai kebijakan, menurut Budiardjo dalam buku Studi Kebijakan Pemerintah mengatakan, bahwa secara konseptual sering dikonsepsikan dengan terminologi “kebijaksanaan” sebagai konsep filsafat yang diterminologikan dengan *“wisdom”* yang berarti “cinta kebenaran”. Konsep “kebijaksanaan” diartikan sebagai “pernyataan kehendak”; dalam bahasa politik diistilahkan sebagai *“staatemen of intens”* atau peerumusan keinginan. Kebijakan diartikan sebagai pernyataan kehendak yang diikuti oleh unsur pengaturan dan tau paksaan, sehingga dalam pelaksanannya akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Di dalam kerangka itulah, pelaksanaan kebijakan memerlukan kekuasaan dan wewenang yang dapat dipakai untuk membina kerjasama dan meredam serta menyelesaikan berbagai kemungkinan terjadinya konflik sebagai akibat dari pencapaian kehendak.

Pelaksanaan KTP Elektronik merupakan program nasional yang harus terlaksana dengan baik, karena merupakan program yang memerlukan pembiayaan besar tetapi manfaatnya juga sangat besar, baik bagi penduduk, bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan komitmen serta stategi penyelesaian dari permasalahan tersebut baik dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota beserta jajarannya dan penduduk.

Adapun strategi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengelola permasalahan terkait peningkatan cakupan kepemilikan KTP-el yakni :

1. **Memfasilitasi dan mengkoordinasikan Kabupaten/Kota dalam penyediaan Blangko KTP-el.**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Gubernur sebagai Pemerintah Provinsi dan pada umumnya Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkewenangan untuk melakukan koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Salah satu bentuk fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan terkait dengan penyediaan Blangko KTP-el yakni menugaskan pegawai lingkup Dinas Dukcapil Provinsi untuk menjemput blangko KTP-el di pemerintah pusat, lalu setelah itu didistribusikan ke 24 Kab/Kota. Adapun data yang didapatkan terkait dengan jumlah blangko KTP-el yang telah diterima oleh Kab/Kota, yakni :

**Tabel. 11 Jumlah Blangko KTP Elektronik yang Diterima Oleh Kabupaten/Kota Tahun 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO. | KABUPATEN/KOTA | JUMLAH BLANGKO KTP-EL |
| 7301 | **KEPULAUAN SELAYAR** | **1.000 Keping** |
| 7302 | **BULUKUMBA** | **10.000 Keping** |
| 7303 | **BANTAENG** | **500 Keping** |
| 7304 | **JENEPONTO** | **11.000 Keping** |
| 7305 | **TAKALAR** | **6.000 Keping** |
| 7306 | **GOWA** | **5.000 Keping** |
| 7307 | **SINJAI** | **2.000 Keping** |
| 7308 | **BONE** | **7.000 Keping** |
| 7309 | **MAROS** | **6.000 Keping** |
| 7310 | **PANGKAJENE KEPULAUAN** | **2.000 Keping** |
| 7311 | **BARRU** | **2.000 Keping** |
| 7312 | **SOPPENG** | **4.500 Keping** |
| 7313 | **WAJO** | **2.000 Keping** |
| 7314 | **SIDENRENG RAPANG** | **13.000 Keping** |
| 7315 | **PINRANG** | **3.500 Keping** |
| 7316 | **ENREKANG** | **4.000 Keping** |
| 7317 | **LUWU** | **1.000 Keping** |
| 7318 | **TANA TORAJA** | **1.000 Keping** |
| 7322 | **LUWU UTARA** | **1.000 Keping** |
| 7324 | **LUWU TIMUR** | **14.000 Keping** |
| 7326 | **TORAJA UTARA** | **-** |
| 7371 | **MAKASAR** | **7.000 Keping** |
| 7372 | **PARE-PARE** | **6.000 Keping** |
| 7373 | **PALOPO** | **-** |

Sumber : Buku Blangko Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian

 Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. Sulsel, Tahun 2018.

Adapun prosedur pengelolaan blangko KTP Elektronik yakni :

1. Permintaan Blangko KTP-el dari Daerah :
2. Surat permohonan permintaan blangko KTP-el dari Dinas Dukcapil;
3. Stempel Dinas Dukcapil Kab/Kota;
4. Petugas Dinas Dukcapil yang mengambil harus memiliki NIP.
5. Pendistribusian blangko KTP-el

Mekanisme Pendistribusian blangko KTP-el :

1. Ditjen Dukcapil mendistribusikan ke Disdukcapil Provinsi, selanjutnya Disdukcapil Provinsi meneruskan ke Disdukcapil Kabupaten/Kota;
2. Disdukcapil Kabupaten/Kota mengambil langsung ke Ditjen Dukcapil;
3. Ditjen Dukcapil mengirim Blangko KTP-el melalui jasa ekspedisi pengiriman ke Disdukcapil Provinsi/Kabupaten/Kota.
4. Penetapan jumlah blangko KTP-el

Penetapan jumlah blangko KTP-el yang akan diberikan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Progress pencetakan KTP-el di Disdukcapil Kab/Kota;
2. Jumlah sisa blangko KTP-el di Disdukcapil Kab/Kota;
3. Jumlah status siap cetak (*Print Ready Record*);
4. Jumlah wajib KTP-el yang belum melakukan perekaman.
5. Pengelolaan KTP-el yang telah Dicetak
6. Memilah KTP-el yang telah selesai dicetak baik itu yang bagus dan yang rusak;
7. Merekap dan menyimpan blangko KTP-el yang salah cetak;
8. Merekap dan menyimpan blangko KTP-el yang rusak fisik;
9. Merekap dan menyimpan blangko KTP-el yang gagal encording
10. Pemusnahan blangko KTP-el yang dikembalikan dari Daerah ke Pusat.
11. Pengelolaan KTP-el di tempat pelayanan
12. Mencatat dalam buku harian dengan memilah pencetakan penggantian blangko KTP-el akibat perubahan elemen data, pindah dating;
13. Mencatat dalam buku harian dengan memilah blangko KTP-el yang salah cetak, rusak fisik dan gagal encording;
14. Blangko KTP-el yang salah cetak, rusak fisik dan gagal encording untuk di kumpulkan sesuai kategori masing-masing selanjutnya di packing untuk di kembalikan ke Kemendagri untuk di musnahkan.
15. **Meningkatkan kapasitas penyelenggara administrasi kependudukan dalam penerbitan KTP-el melalui pelatihan atau bimbingan teknis.**

Berdasarkan kewenangan sebagaiamana yang dimaksud dalam peraturan administrasi kependudukan, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya dan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada khususnya, memberikan Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk (Bimtek Dafduk) terhadap Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, dengan maksud agar terselenggarakannya Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kependudukan Bagi Aparat Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan dan tujuannya untuk meningkatkan efektifitas dan kemampuan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan di Provinsi Sulawesi Selatan, serta diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

**SIMPULAN DAN SARAN**

Strategi Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan cakupan kepemilikan Kartu Tnda Penduduk Elektronik (KTP-el) yakni: 1) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan Kabupaten/Kota dalam penyediaan Blangko KTP-el. Adapun jumlah blangko yang telah didistribusikan oleh Disdukcapil Provinsi Sulawesi Selatan ke 24 Kabupaten/Kota pada Tahun 2018 yakni sebanyak 110.500 keping; 2) Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam penerbitan KTP-el melalui pelatihan atau bimbingan teknis. Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh Disdukcapil Prov. Sulsel yakni Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk (Bimtek Dafduk) terhadap Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, dengan maksud agar terselenggarakannya Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kependudukan Bagi Aparat Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan kemampuan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan di Provinsi Sulawesi Selatan, serta diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

Kepada Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan pembantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan, pencatatan sipil, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam hubungan tersebut, Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan selaku Pembina dari Dinas Dukcapil di 24 Kabupaten/Kota,diharapkan agar dapat lebih responsif sehingga kedepannya melalui kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat dilakukan dengan maksimal dan agar terciptanya tertib administrasi kependudukan sehingga data kependudukan yang ada dapat dimanfaatkan untuk rencana pembangunan kedepannya dan lembaga pelayanan publik yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

**REFERENSI**

Apriliani, N., Nur, T., & Mulyadi, A. (2019). Evaluasi Kebijakan KTP Elektronik (Ktp-El) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. *Papatung Jurnal Ilmu Administrasi Publik Pemerintahan Dan Politik*, *2*(2), 13–27. https://doi.org/10.54783/japp.v2i2.2

Risni, D., Yuhan, J., & Ruri Indraswari, R. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penundaan Kelahiran Anak Pertama Di Wilayah Perdesaan Indonesia: Analisis Data Sdki 2012 (Factors Affecting the Delay First Birth in Rural Indonesia: an Analysis of the 2012 Idhs). *Jurnal Kependudukan Indonesia |*, *12*(Juni), 1–12.

Rosyanty, E. (2018). Penerapan KTP-el Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Kota Tegal. *Indonesian Governance Journal Kajian Politik-Pemerintahan*, *1*(1), 48. https://doi.org/10.24905/igj.v1i1.4

Sukma, H. N., Amrina, E., & Hasan, A. (2018). Evaluasi Proses Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Metode Lean Office. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, *17*(2), 171–187. https://doi.org/10.25077/josi.v17.n2.p171-187.2018

Wahyuni, N., Akib, H., & Darwis, M. (2017). Keefektifan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, *7*(1), 1. https://doi.org/10.26858/jiap.v7i1.3434

**Buku – Buku**

* Ali, Faried dan Syamsu Alam, 2012, Studi Kebijakan Pemerintahan, PT. Refika Aditama, Bandung.
* Buku Data Kependudukan Provinsi, Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Semester II Tahun 2018.
* Buku Blangko Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.

**Peraturan**

* Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
* Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
* Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan
* Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan.

 - Selamat Menulis -

**Sekretariat Redaksi Jurnal**

 **Indonesian Journal of Analysis Public Policy and Innovation (IJAPPI)**, **Publisher: ITBA Al Gazali Barru**

Alamat (*address*): Jl. Jend. Sudirman No. 41 Sumpang Binangae Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Indonesia